

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat mengharuskan daerah yang terlalu luas cakupannya untuk segera dimekarkan. Tujuan utama dari sebuah pemekaran wilayah ditujukan agar memperpendek jarak kendali yang dilakukan oleh pemerintah sehingga nantinya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan lebih optimal.¹ Secara filosofis, pemekaran wilayah ini diharapkan dapat mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga program Pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan juga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah yang satu dengan wilayah lainnya.² Perkembangan suatu kota dapat dilihat dari keadaan fisik maupun sosial masyarakat yang menetap di dalamnya. Penilaian terhadap perkembangan kota menitik beratkan terhadap suatu perubahan yang biasanya didasarkan pada waktu yang berbeda untuk menganalisa perubahan yang sama.

Landasan Teori mengenai pemekaran wilayah sejak terbitnya kebijakan ekonomi daerah di Indonesia dengan dicanangkan banyak daerah-daerah yang cenderung untuk melaksanakan pemekaran wilayah. Peluang yang secara normatif untuk melakukan pemekaran wilayah atau suatu daerah baru dapat dilaksanakan sepanjang mengikuti prosedur dan juga mekanisme dan juga ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan suatu payung hukum terhadap kebijakan pemekaran wilayah, maka pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 2000 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang pengaturan Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan juga Penggabungan Daerah. Pembentukan suatu

¹ Achmad Siddiq dan Hariyanto (2022), *Wakaf dan Pemekaran Wilayah Perspektif Mashlahah Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm 169.

² Enggar Nasha Diyanti (2022), *"Dinamika Politik Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah Tahun 2022"*, Skripsi (Jakarta: Universitas Nasional): hlm 7.

wilayah otonomi baru dapat dilaksanakan dengan catatan memiliki syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan juga pertimbangan lain yang dapat memungkinkan berdirinya otonomi daerah. Glasson dalam Tarigan menyebutkan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisi atau berdasarkan fungsinya, yaitu;

- a. Wilayah fungsional, adanya saling interaksi antar komponen-komponen di dalam dan juga di luar wilayahnya, wujud wilayah sering juga dinamakan wilayah *nodal* yang didasari oleh susunan sistem yang hirarki dari suatu hubungan diantara simpul-simpul perdagangan,
- b. Wilayah Homogen, maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah.
- c. Wilayah administratif, maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah ataupun pihak-pihak.³

Pengembangan wilayah dapat dimungkinkan karena adanya cukup modal yang bertumpu terhadap pengembangan sumber daya alam, dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada akhirnya menimbulkan arus barang.⁴ Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi merupakan bentuk wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau dan juga antarnegara. Parr menyebutkan ada beberapa konsep pengembangan wilayah, yaitu :

- a. Membangkitkan kembali daerah yang terbelakang (*depressed area*), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk dan rendahnya tingkat pelayanan.
- b. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini juga dapat menekan tingkat konsentrasi wilayah yang bertujuan agar membentuk struktur ruang yang

³ Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit PU. hlm 32

⁴ Purnomosidi, Hadjisarosa .(1978). *Pengenalan Masalah Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Penerbit PU. hlm 54

tepat terutama pada beberapa bagian dari daerah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya yang terlalu besar.

- c. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan system perkotaan yang telah memiliki hirarki yang juga terstruktur dengan baik dan diharapkan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
- d. Pencapaian terhadap kesembangan wilayah, dikarenakan kurang memuaskannya struktur ekonomi antar inter-regional yang biasanya mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.⁵

Angka PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode.⁶ Salah satu contoh juga dialami oleh Kota Banjar yang ada di Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini sebelumnya masuk dan menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Ciamis. Perubahan tersebut sangat erat kaitannya dengan perubahan fisik atau perubahan sosialnya. Sejak masih menyandang status sebagai Kota Administratif (Kotif), Kotif Banjar berkembang dengan sangat cepat dari tahun ke tahun hingga pada akhirnya menjadi Kota.

Posisi Kota Banjar sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Jawa Tengah sehingga hal ini secara tidak menguntungkan Kota Banjar karena sebagai (*buffer zone*) atau pintu gerbang Jawa Barat bagian Selatan. Bukan hanya itu saja, Kota Banjar ini menjadi jalur lalu lintas pengendara yang akan menuju ke Pangandaran. Secara tidak langsung, hal ini berdampak positif bagi warga masyarakat Banjar, dan menjadikan Kota Banjar sebagai kota perdagangan dan jasa atau kota sebagai kota transit. Pada sekitar 1970-1990, wilayah di jalur lalu lintas

⁵ Parr, John B. Growth Pole (1999). *Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View*. Carfax Publishing.

⁶ Hadi Sasana, (2001). *Pengaruh Hubungan Fiskal Pemerintah Pusat Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten*. Tesis S 2 PMS UGM Yogyakarta

Jawa Barat-Jawa Tengah dan Kawasan wisata Pangandaran ini berkembang menjadi kota transit. Salah satu nya ketika rute transportasi dari dan menuju Jakarta melewati Jawa Barat bagian timur selalu berhenti atau transit terlebih dahulu di terminal Banjar. Bukan hanya itu saja, Banjar bisa dikatakan sebagai kota perdagangan karena Banjar merupakan wilayah perbatasan. Masyarakat dari Kecamatan Cisaga, Banjarsari, Lakbok, Pamarican yang wilayah tersebut berada dalam wilayah Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Banjar, selalu membelanjakan uang mereka ke pasar Banjar. Begitu juga dengan masyarakat Majenang, Dayeuhluhur, Wanareja, dan wilayah sekitar Cilacap bagian barat. Beberapa faktor ini disebabkan karena aksesibilitas membuat masyarakat di perbatasan lebih memilih belanja ke pasar Banjar.

Kota Banjar ketika masih dalam wilayah Kabupaten Ciamis, daerah nya masih digunakan sebagai lahan pertanian sehingga masyarakat nya cenderung berprofesi sebagai petani. Lalu di 2003 setelah peningkatan status/pemekaran dari wilayah induknya, kemudian masyarakat nya mulai bertransformasi atau berpindah kepada sektor jasa dan perdagangan. Kemudian melalui kebijakan pemerintah Banjar untuk membenahi sektor ekonomi dengan cara, memberikan izin pembangunan untuk lahan industri sehingga nantinya diharapkan bisa memunculkan lapangan pekerjaan baru. Begitu juga dengan proses revitalisasi pasar Banjar. Pemerintah Kota Banjar terus berupaya dalam menyediakan tempat yang nyaman bagi para pedagang untuk bisa menjual hasil bumi atau dagangan nya di pasar Banjar, dan hal ini juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Banjar, karena bukan hanya warga asli saja yang berbelanja kebutuhan, akan tetapi juga masyarakat di daerah penghubung Banjar, seperti Dayeuhluhur, Wanareja, Pamarican, dan Cisaga selalu menggunakan pasar Banjar sebagai tempat memenuhi kebutuhan mereka.

Pemerintah Kota Banjar terus berupaya mendorong pemenuhi kebutuhan terutama yang ada pada sektor sosial. Seperti peningkatan alat kesehatan baik itu yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar, maupun juga penambahan Puskesmas yang ada di setiap Kecamatan. Dalam aspek pendidikan penambahan sekolah juga terlihat pada masa transisi dari Kota Administratif Banjar menuju

Pemerintahan Kota Banjar, juga pemberian beasiswa bagi siswa SMA dan SMK yang berkualitas, untuk bisa melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

Melalui laporan utama yang diterbitkan oleh tim independen yang terbit pada tanggal 12 Maret 2001 dapat diketahui sebenarnya bahwa Kota Administratif Banjar ini bisa ditingkatkan statusnya menjadi pemerintahan kota atau menjadi daerah otonomi baru. Hal ini dilihat dari beberapa indikator yang terdapat pada peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000. Indikator yang kemudian terakumulasi menjadi skor layak atau tidaknya suatu daerah dapat dimekarkan, yang tentunya daerah yang layak dimekarkan adalah daerah yang melebihi nilai skor yang telah ditetapkan. Laporan utama dari tim independen yaitu dari Lab Sosiologi Universitas Indonesia mengenai hasil kajian pembentukan daerah Kota Banjar menunjukkan kesiapan terlebih secara nilai skor semua di atas rata-rata daerah atau Kabupaten induk yang akan ditinggal. Seperti skor Potensi Daerah dengan batas minimal 1380 dan Banjar mampu melebihi skor tersebut yaitu 1640. Lalu dalam skor Kemampuan Ekonomi Wilayah, Banjar mampu menyeimbangi wilayah induknya Kabupaten Ciamis, dengan skor 450.⁷

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang disebabkan salah satunya adalah terkait pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga pada akhirnya menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan secara merata. Sjafrizal dalam Pratiwi, menyebutkan bahwa ketimpangan di setiap daerah disebabkan oleh perbedaan kemampuan daerah dalam proses pembangunan dikarenakan kondisi di setiap daerahnya berbeda-beda seperti kondisi alam dan kondisi geografis. Oleh karena itu, ketimpangan ini menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan sehingga dalam penanganannya harus diperhatikan secara serius.⁸

⁷ *Summary Executif hasil pembentukan daerah Kota Banjar*, Jakarta 12 Maret 2001, Lab. Sosiologi FISIP Universitas Indonesia

⁸ Pratiwi, M. C. Y. (2021). *Analisis Ketimpangan Antar wilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan*. Jurnal Borneo Administrator, 17(1), 131–154.

Pemekaran yang dilakukan oleh Kota Banjar ini, telah berlandaskan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa daerah atau wilayah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Istilah yang dipakai adalah pemekaran daerah yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.⁹ Kemudian ketika keluar Undang-Undang No. 22 tahun 1999, seolah menjadi kesempatan atau momentum dan menjadi angin segar bagi berbagai elemen masyarakat Banjar guna menguatkan pada visi sebelumnya yaitu Banjar menuju daerah otonom. Dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa status wilayah Pemerintah Daerah Administratif tidak diakui, sehingga daerah tersebut yang menyandang status Kota Administratif (Kotif) terpaksa harus kembali menjadi pemerintah kecamatan, bukan lagi pemerintah daerah administratif. Lebih jelasnya terkait Undang-Undang ini yaitu wilayah Kota Administratif memiliki dua opsi.

Opsi yang pertama adalah wilayah Pemerintahan Administratif harus Kembali pada induknya, dengan kata lain Kembali menjadi pemerintah kecamatan. Lalu opsi yang kedua adalah mendirikan atau pemekaran dari daerah induknya menjadi daerah otonom. Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. Selain itu, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan juga ekonomi jangka panjang, termasuk beberapa potensi yang dapat mengakibatkan konflik karena disebabkan oleh beberapa perubahan struktur sosial dan pembagian wilayah yang tidak merata.¹⁰

Keputusan-Keputusan terkait dengan kebijakan sangat penting dan juga seringkali dibuat pada tingkat kaukus partai daripada di dalam komisi-komisi bila dilihat dari karakter, maka dalam penggunaan fungsi legislasi terjadi garis

⁹ Hasriani. (2016). *Study Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi Ekonomi.

¹⁰ Nora Lelyana dan Aris Sarjito (2024), “*Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertahanan Negara: Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*,” Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau 4: hlm 32.

damarkasi antara bagian eksekutif dengan yang menjalankan atau mengimplementasikan dengan bagian legislasi yang merumuskan kebijakan normatif itu.¹¹ Akhirnya Banjar telah resmi pisah dari Ciamis, kepastian ini terungkap dalam siding paripurna ke 12 DPR RI yang secara khusus membahas terkait pengesahan RUU Pemerintah Kota Banjar, Selasa 12 November 2002. Sembilan farski di DPR RI dalam pendapat akhir fraksi, semuanya menyetujui Banjar menjadi Pemerintah Kota. Namun sesuai peraturan yang berlaku, selama tiga tahun Banjar masih menjadi asuhan Kabupaten Induk. Selama dalam asuhan Kabupaten Induk itu, Pemerintah Kota Banjar harus pula menyiapkan berbagai perangkat pemerintahan dan juga Menyusun APBD sendiri. Jika nantinya Banjar tidak bisa menghidupi dirinya, maka semua berkas-berkas terpaksa akan di gabungkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada “Tranformasi Sosial dan Ekonomi Kota Banjar Tahun 1999-2008”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai transformasi masyarakat Kota Banjar dalam bidang sosial dan ekonomi. Referensi dalam penelitian ini yaitu keluarnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai momentum awal proses pemekaran Kota Banjar. Selain itu juga penelitian ini akan mengidentifikasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi sebelum dan setelah pemekaran Kota Banjar, dan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat pada awal periode pemerintahan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Transformasi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kota Banjar ketika sebelum dan setelah menjadi Kota dalam kurun waktu tahun 1999-2008 ?”

¹¹ Yayan Sofyan (2010). *Mekanisme Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Kelayakan Otonomi Daerah* . Pengantar Metode Penelitian, (Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta), hlm 45

Rumusan masalah di atas dapat diuraikan kedalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi wilayah Banjar sebelum dan awal pemekaran, pada tahun 1999-2003 ?
2. Bagaimana transformasi sosial dan ekonomi Banjar pada awal terbentuknya kota di tahun 2003-2008 ?
3. Bagaimana dampak transformasi pengembangan kota terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Banjar periode 2003-2008 ?

3. Tujuan Penelitian

Pada uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dapat dibuat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Banjar sebelum menjadi kota di tahun 2003.
2. Untuk mengetahui tentang transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi pada saat awal terbentuknya kota sampai periode awal pemerintahan,
3. Untuk mengetahui dampak dari transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi pasca pemekaran yang terjadi di masyarakat Kota Banjar.

4. Manfaat Penelitian

4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru bagi pembaca mengenai “Transformasi Sosial Ekonomi Kota Banjar Pada Tahun 1999-2008”. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ilmu Sejarah yang berkaitan dengan pembentukan pemerintahan. Selain daripada itu juga diharapkan mampu menjadi sebuah referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pembentukan daerah otonom, maupun perkembangan sosial ekonomi di masyarakat pasca menjadi kota.

4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ilmiah dalam mengkaji penelitian yang serupa. Penulis telah merangkum ke dalam beberapa target sasaran dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Banjar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi Pemerintah Kota Banjar untuk mengevaluasi tentang kebijakan pemekaran daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek salah satunya adalah kebutuhan Masyarakat, dengan efektivitas administratif dan juga peningkatan pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah guna merancang kebijakan yang lebih inklusif dan juga efisien yang nantinya diharapkan berdampak positif dalam jangka Panjang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai tujuan dan juga dampak dari kebijakan pemekaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal ini dapat membantu masyarakat dalam memahami alasan dari kebijakan tersebut dan juga menyiapkan mereka dalam memberikan dukungan atau kritikan yang bersifat konstruktif. Penelitian ini juga dapat mendorong terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kota Banjar, seperti dalam aspek Pendidikan, Kesehatan, dan juga Administrasi.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu menjadi sebuah referensi penting bagi akademisi atau peneliti yang akan mengembangkan atau meneliti terkait sejarah perkembangan Kota Banjar. Hasil dari penelitian nantinya dapat memperkaya literatur dan landasan teori mengenai pemekaran daerah atau hubungan antara sosial, ekonomi dengan konsep pemekaran wilayah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

5. Tinjauan Teoretis

5.1 Kajian Teori

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh peneliti. Teori ini nantinya berfungsi sebagai dasar untuk memahami dan juga menganalisis permasalahan yang diteliti. Para ahli telah memberikan berbagai macam definisi mengenai teori dalam konteks penelitian. Salah satunya telah dikemukakan oleh Kerlinger, yang menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan juga proposisi yang telah disusun secara sistematis, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena melalui hubungan yang spesifik antar variabel, sehingga teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan dan juga meramalkan apa yang terjadi.

A. Teori Desentralisasi

Menurut Undang – Undang No 22 tahun 1999, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (baru) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kewenangan yang diserahkan tersebut mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.¹²

Desentralisasi merupakan sebuah azas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi ini nantinya menghasilkan sebuah pemerintahan lokal dengan adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang Gerak yang memadai guna memaknai kewenangan yang telah diberikan kepada unit pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2004–2009 menitik beratkan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah sebagai salah satu prioritas dalam Pembangunan nasional. Revitalisasi tersebut antara lain :

¹² Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indonesia..

1. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan,
2. Mendorong Kerjasama antar pemerintah daerah,
3. Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan juga efisien,
4. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah,
5. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, dan
6. Menata Daerah Otonom Baru (DOB).

Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut di berbagai negara akan menemui dua hal yang berbeda corak yaitu dengan bentuk *local democracy* yang bercorak sentralisasi dan *local democracy* yang bercorak desentralisasi.¹³ Desentralisasi dapat dipahami guna meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas administrasi antar pemerintahan dalam mengaktualisasikan representasi lokal, sehingga adanya keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.¹⁴ Dalam konteks pemekaran daerah atau sebuah wilayah lebih kita kenal sebagai pembentukan daerah otonom baru, bahwa nantinya daerah tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang ada seperti sumber daya manusia, pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan juga pengelolaan bantuan daerah pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan juga pelayanan kepada publik yang lebih baik.

Keterkaitan antara teori dengan desentralisasi adalah sangat jelas terlihat dalam upaya pemekaran Kota Banjar dari wilayah Kabupaten Ciamis. Tujuan dari pemekaran wilayah ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat tujuan kesejahteraan bagi masyarakat dan memajukan suatu daerah seperti dalam sektor ekonomi, sosial, hukum, dan juga keamanan. Konsep pemekaran inilah menjadi salah satu jalan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan sangat bergantung kepada manajemen birokrasi pemerintah sumber daya pemerintah dan juga sumber daya alami suatu daerah.

¹³ Waskitawati, D. (2018). *Managing wastewater in decentralized indonesia: could local democracy improve public service?* CosmoGov, 4(2), hlm 213.

¹⁴ Hamdi, M. (2002). *Bunga rampai pemerintahan*. Jakarta: Yasrif Watampone.Hidayati,

B. Teori Kesejahteraan Sosial

Beberapa komponen Beberapa komponen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (self esteem) dan dukungan sosial. Menurut Chess & Thomas, yang dikutip (Ashworth & Saxton), menyebutkan bahwa pemekaran merupakan pusat pengembangan manusia agar berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil, dan optimis. Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai faktor penting bagi kesejahteraan wanita menikah, termasuk didalamnya kesejahteraan ibu hamil.¹⁵ Kesejahteraan suatu wilayah ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, fisik, dan sumber daya lainnya. Sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Todaro menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Keterkaitannya antar teori kesejahteraan sosial dengan dengan penelitian yang akan dibawa yaitu “Transformasi Sosial Ekonomi Kota Banjar Tahun 1999-2008”, adalah bahwa Kota Banjar ingi mandiri sepenuhnya, karena secara aspek geografis dan juga aspek ekonomi Kota Banjar, sangat strategis. Dapat dilihat dari pergerakan ekonomi di pasar Banjar, secara rata-rata pengunjung atau pembeli bukan masyarakat asli Banjar saja, akan tetapi dari wilayah lain juga, seperti warga yang berada di wilayah Pamarican Ciamis, mereka lebih memilih berbelanja kebutuhan di pasar Banjar, begitu juga dengan masyarakat yang ada di wilayah Cilacap mereka lebih memilih berbelanja kebutuhan di pasar Banjar, karena secara geografis Cilacap yang berada di wilayah Jawa Tengah itu berbatasan langsung dengan Kota Banjar. Maka dari itu Kota Banjar ingin mekar dari wilayah Kabupaten Ciamis karena dirasa secara ekonomi Banjar mampu lebih mandiri.

¹⁵ Ashworth, P. D., & Saxton, J. (2006). *On Competence. Journal of Further and Higher Education*, 37–41.

C. Teori Urban Development

Dalam sebuah aspek perkembangan wilayah, terdapat dua kekuatan dinamis yang sangat berpengaruh yaitu kekuatan sentrifugal dan sentripetal.¹⁶ Kekuatan sentripetal mengakibatkan gerakan penduduk dari bagian luar kota bergerak menuju bagian dalam kota yang dipengaruhi oleh kualitas daya tarik yang ada di pusat kota atau kawasan. Sementara itu, kekuatan sentrifugal mendorong gerakan penduduk dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya keluar dari kawasan pusat kota menuju ke wilayah pinggirannya. Kekuatan sentrifugal ini merupakan Desa-Kota, salah satu pendorong terjadinya peri-urbanisasi. Istilah peri-urbanisasi merujuk pada suatu proses dimana daerah perdesaan yang terletak di pinggiran kota yang sudah mapan menjadi lebih berkarakter urban dalam hal fisik, ekonomi, dan sosial.¹⁷

Kaitannya teori urban development dengan judul pembahasan “Transformasi Sosial Ekonomi Kota Banjar Tahun 1999-2008” adalah bagaimana pergerakan manusia, atau yang disebut urbanisasi adalah karena Banjar memiliki sektor pendukung yaitu dalam bidang Ekonomi dan juga Kesehatan, Banjar lebih mapan dibandingkand daerah tetangga nya. Banjar telah membuat perputaran ekonomi di wilayah sekitar nya maju dengan adanya pasar yang memenuhi kebutuhan Masyarakat yang ada di wilayah Kota Banjar. Bukan itu saja dalam bidang kesehatan rata – rata Masyarakat yang ada di wilayah Banjar itu berobat di RSUD Kota Banjar. Mengapa demikian karena pada saat itu Rumah Sakit Umum Daerah Banjar dapat dikatakan kelengkapan medis nya cukup lengkap dengan dibantu tenaga medis yang berpengalaman dalam bidang nya.

5.2 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan bahan bacaan yang terdiri dari teori yang dipergunakan untuk melakukan suatu penelitian. Kajian Pustaka ini disesuaikan

¹⁶ Astuti, P. W. (2010). *Pengaruh Perkembangan Kota Surakarta terhadap Permukiman di Kawasan Solo Baru.*, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

¹⁷ Webster, D. R. (2002). *On the Edge: Shaping the Future of Peri-urban East Asia.* In Asia Pacific Research Center. Stanford: Stanford University.

dengan rumusan masalah terkait dengan Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Banjar, sebelum dan setelah Menjadi Kota dalam kurun waktu tahun 1999-2008 ?”

Pertama, buku yang berjudul “Memoar Kota Banjar” yang diterbitkan oleh Ruang Baca Komunitas dengan karya dari Sulyanati ini menjelaskan bahwa lahirnya sebuah Kota Banjar ini merupakan berkat perjuangan dari para tokoh dan juga masyarakat Banjar yang menginginkan pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis dengan catatan terdapat beberapa pertimbangan seperti potensi daerah, kondisi sosial masyarakat, kondisi geografis banjar, dan juga beberapa faktor lain yang dapat mendukung terbentuknya atau meningkatnya status kota administratif menjadi kota banjar. Dalam buku ini juga menjelaskan terkait dengan bagaimana momentum terbentuknya Kota Banjar itu adalah dengan keluarnya peraturan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah yang mana isi dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kota Administratif dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota. Pemerintahan Kota (Pemkot) adalah sebuah istilah baru dalam sistem pemerintahan daerah yang mana menurut UU No. 20 tahun 1999 sebagai pengganti dari istilah Pemerintah Kotamadya (Kodya) sebagaimana yang tercantum dalam UU No.5 tahun 1974. Dalam penelitian lain menyebutkan bahwa Kota Banjar ini mempunyai letak geografis yang sangat menguntungkan karena diapit oleh dua Provinsi besar di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga hal tersebut dapat mendorong sendi-sendi perekonomian masyarakat Banjar.

Kedua, adalah Buku “Banjar Satu Dekade Resep Manjur Kepemimpinan Dokter Herman”. Buku ini menceritakan bagaimana proses Kota Banjar bisa terbentuk. Buku ini juga menceritakan bagaimana Sejarah awal Banjar dari mulai mnejadi kota administratif (kotif) hingga menjadi Kota Banjar (daerah otonom). Dalam buku ini juga menceritakan bagaimana keberhasilan dari kepemimpinan dokter Herman dalam memimpin Banjar selama dua periode. Terlihat jalan yang ada di Banjar, yang tadinya hanya jalan biasa dan tidak di aspal, dalam kurun waktu sepuluh tahun kepemimpinan Dokter Herman semua jalan tersebut bisa di aspal.

5.3 Penelitian Yang Relevan

Pertama, penelitian yang berjudul “Transformasi Kota Banjar Tahun 2004-2014”, dalam penelitian lebih berfokus terhadap kondisi geografis Kota Banjar dari tahun 1999-2008. Namun perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus terhadap transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Banjar dari rentang tahun 1999 sampai dengan 2008.

Kedua, penelitian yang berjudul “Implikasi Sosial Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait dampak dari pemekaran sangat berpengaruh terhadap perubahan ekonomi dan juga membuat fasilitas-fasilitas publik semakin dekat dengan masyarakat. Namun hubungan nya dengan penelitian adalah Penelitian ini nantinya akan mengetahui sejauh mana pemekaran kota banjar berhasil dilakukan khususnya dalam aspek sosial dan juga ekonomi.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020”. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana ketimpangan antara daerah – daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dan juga perbedaan pertumbuhan ekonomi. Hubungan nya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait beberapa ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi Masyarakat

Keempat, penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian Ini mengkaji seberapa jauh tingkat terwujudnya kesejahteraan masyarakat selama 10 tahun pasca pemekaran. Hubungannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait Peningkatan Kesejahteraan Sosial, namun perbedaan terletak dalam tahun jika penelitian Evaluasi Pemekaran Daerah itu datanya selama dua periode, berbeda halnya dengan penelitian Ini yang mengkaji kondisi sosial ekonomi Masyarakat sebelum dan setelah pemekaran.

5.4 Kerangka Konseptual

Penulis menggunakan konsep – konsep dalam rangka menghubungkan teori – teori yang ada dengan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana perkembangan Banjar dari tahun 1999 sampai dengan 2008. Rentang waktu tersebut dipilih guna melihat bagaimana momentum pemekaran daerah (UU No 22 Tahun 1999) sebagai modal bagi Kota Banjar mekar dari Kabupaten Ciamis, dan juga melihat bagaimana Banjar bisa berdiri sampai 2008 apakah terjadi perubahan terlebih dalam konteks yang diambil yaitu bidang sosial dan juga ekonomi.

6. Metodologi Penelitian

6.1 Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode historis untuk merekonstruksi berupa suatu data-data yang disusun menjadi suatu rangkaian yang bermakna. Selanjutnya langkah-langkah metode historis yang dilakukan penulis adalah dalam mengadakan penelitian ini antara lain :

6.1.1 Heuristik

Heuristik, merupakan tahapan dalam mencari dan juga mengumpulkan sumber-sumber melalui berbagai cara untuk mengetahui kejadian yang terjadi di masa lalu. Mengenai sumber-sumber Sejarah yang didapatkan penulis saat ini adalah :

1. Buku yang berjudul Memoar Kota Banjar karya dari Sulyanati menjelaskan tentang bagaimana proses dinamika sosial sebelum pemekaran kota Banjar dari tahun 1999 sampai pemekaran Pemekaran Kota Banjar di tahun 2003.
2. Buku Banjar Satu Dekade Resep Manjur Kepemimpinan Dokter Herman. buku ini menjelaskan gaya kepemimpinan Dokter Herman dalam menjabat selama dua periode terhitung sejak Banjar berdiri 2003 sampai 2013.
3. Penelusuran arsip-arsip yang berkaitan dengan momentum pembentukan Kota Banjar. Penelusuran arsip ini dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar.

6.1.2 Kritik Sumber

Setelah tahapan heuristik, penulis kemudian melakukan kritik sumber. Kritik sumber ini dilakukan dengan tujuan agar menilai sejauh mana sumber tersebut efektif dalam penelitian ini. Kritik sumber ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kritik Ekstern, merupakan proses pemeriksaan asal - usul suatu sumber, termasuk penelitian terhadap dokumen guna memperoleh sumber dengan sebanyak mungkin. Kritik ekstern ini difokuskan pada aspek luar dari sumber, seperti bentuk tulisan, tanggal pembuatan. Tujuan dari kritik sumber ini adalah untuk memastikan otentisitas (keaslian) dan integritas dari suatu sumber Sejarah. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis material fisik sumber tertulis seperti arsip, dokumen, Teknik penulisan, untuk menentukan keaslian material. Salah satu nya adalah salah satu sumber nya adalah dalam Buku Banjar Satu Dekade Resep Manjur Kepemimpinan Dokter Herman. Kemudian memastikan data dan juga isi yang terkandung dalam buku tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di Kota Banjar tahun 1999 sampai 2008.
2. Kritik Intern, merupakan proses uji otentisitas sumber yang ditujukan kepada penampilan luar dari sebuah sumber Sejarah. Oleh karena itu kritik intern harus membuktikan bahwa apa yang terkandung dalam sumber Sejarah tersebut bisa dipercaya. Dalam mengkritik sumber primer, Langkah-Langkah yang dilakukan penulis adalah dengan memeriksa konten dokumen, menilai apakah informasi yang disajikan benar dan relevan dengan subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meninjau isi dan juga dokumen dari Badan Pusat Statistik guna melihat kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat Banjar dari tahun 1999-2008, baik dari segi Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan.

6.1.3 Interpretasi

Setelah melakukan beberapa tahapan tadi, Langkah penelitian selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber tersebut. Tahapan interpretasi ini seringkali disebut sebagai inti dari subjektivitas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penafsiran dengan cara menganalisis data yang telah

dikumpulkan, kemudian menyatukannya melalui sintesis untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh data fakta yang relevan sesuai dengan focus kajian dalam judul penelitian.

6.1.3 Historiografi

Historiografi merupakan proses penyusunan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian Sejarah secara ilmiah dan juga sistematis. Tahapan ini bertujuan untuk menyajikan temuan-temuan penelitian ke dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami dan dianalisis oleh pembaca. Melalui tahapan historiografi ini seluruh proses penelitian mulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi hingga sintesis data dihimpun secara koheren untuk membentuk suatu narasi Sejarah yang utuh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan deskriptif-analitis berarti peneliti tidak hanya menggambarkan (mendeskripsikan) peristiwa sejarah, tetapi juga menganalisis hubungan sebab-akibat dari berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perubahan di Kota Banjar antara tahun 1999–2008. Pendekatan historis digunakan karena:

1. Penelitian ini berhubungan langsung dengan peristiwa masa lalu, yaitu proses pemekaran dan dinamika pembangunan Kota Banjar.
2. Tujuannya adalah untuk memahami perubahan sosial ekonomi yang terjadi secara kronologis dan kontekstual.
3. Data yang digunakan bersumber dari dokumen, arsip, laporan serta wawancara dengan saksi Sejarah atau pemangku kebijakan lokal.

Pendekatan	Fokus Kajian	Tujuan
Sosiologis	Struktur sosial, mobilitas penduduk, lembaga sosial	Menjelaskan perubahan pola kehidupan masyarakat pasca pemekaran

Ekonomi	Perdagangan, industri, pendapatan, dan juga infrastruktur ekonomi	Menganalisis terkait pertumbuhan ekonomi daerah dan juga kesejahteraan Masyarakat
---------	---	---

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu tahapan yang mana peneliti akan gunakan nantinya sebagai acuan yang terdiri dari kegiatan yang berisikan uraian hasil terkait dengan pembahasan proposal, dengan di setiap bagian nya saling berhubungan satu sama lainnya. Penelitian yang berjudul “Transformasi Sosial dan Ekonomi Kota Banjar Tahun 1999-2008” ini nantinya akan terdiri dari beberapa bagian bab.

BAB I, adalah bagian yang berisikan pendahuluan yang di dalamnya akan memuat bagian seperti latar belakang masalah terkait perkembangan sosial ekonomi Kota Banjar di tahun 1999-2008, rumusan masalah yang diadopsi oleh peneliti dari judul penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, tinjauan teoritis yang dibagi menjadi ke dalam beberapa point yaitu ada kajian teori yang dipergunakan dan mencakup teori-teori yang bisa membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu ada teori desentralisasi dan juga teori kesejahteraan sosial

BAB II, bagian bab ini peneliti akan menjabarkan hasil pembahasan yaitu terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Banjar sebelum dan awal pemekaran, pada tahun 1999-2003.

BAB III, pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil pembahasan, yaitu terkait dengan transformasi sosial dan ekonomi masyarakat Banjar pada awal terbentuknya kota di tahun 2003-2008.

BAB IV, pada bagian ini peneliti akan membahas yaitu terkait dengan dampak dari transformasi kota terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Banjar periode 2003-2008.

BAB V, ini adalah bagian penutup yang meliputi terkait dengan Kesimpulan yang akan peneliti simpulkan berdasarkan isi serta hasil penelitian yang akan diringkas

keseluruhan informasinya dan di bab ini peneliti akan mencatumkan saran-saran perihal hasil dari penelitian yang telah diteliti.